

PENGARUH PEMOTONGAN BANTUAN DOMESTIK DI NEGARA MAJU TERHADAP EKONOMI PANGAN INDONESIA

Oleh

Budiman Hutabarat dan Saktyanu K. Dermoredjo

RINGKASAN

Perundingan pertanian di OPD hampir tidak mengalami kemajuan sejak dihasilkannya kerangka kerja Paket Juli (*July Package*) pada tahun 2004. Perundingan sektor pertanian tetap berjalan sulit, bahkan sampai saat Konferensi Tingkat Menteri (KTM) VI di Hongkong yang telah berlangsung pada Desember 2005 yang lalu. Semua negara masih ingin melindungi pertaniannya dengan berbagai cara dengan Bantuan Domestik/BD, Subsidi Ekspor/SE atau menaikkan tarif. Makalah ini ditujukan untuk menganalisis (*ex ante*) pengaruh pemotongan atau bahkan penghapusan BD yang dilakukan NM terhadap kinerja komoditas pangan Indonesia melalui teknik simulasi.

Hasil simulasi menunjukkan perbedaan yang jelas dalam perubahan harga-harga masukan antara NM (yang diwakili AS dan UE) dan NB (yang diwakili Indonesia dan K 33) akibat pemotongan subsidi domestik di NM. Hal ini ditunjukkan oleh semua skenario yang dicoba. Sementara harga lahan dan upah tenaga kerja/TK tak terampil menurun di NM, keadaan sebaliknya justru terjadi di NB. Bagi faktor produksi modal, pemotongan BD di NM memberi pengaruh yang jelas berbeda juga antara di AS di satu pihak dan di UE, Indonesia dan K 22 di pihak lain untuk semua usulan. Dalam hal ini NB mengalami penurunan PDB, tetapi dengan persentase yang kecil sekali, sementara NM mengalami peningkatan PDB yang juga relatif kecil. Indonesia sendiri diperkirakan mengalami penurunan sebesar 0,003 persen. Tingkat penurunan PDB Indonesia ini relatif sangat kecil.

Seiring dengan indikator PDB, pemotongan BD di NM memberi dampak pada penurunan kesejahteraan, yaitu sebesar 18-28 juta dolar AS di Indonesia dan 460-650 juta dolar AS di K 33, sementara di AS dan UE tetap meningkat. Peningkatan kesejahteraan paling besar dirasakan oleh AS. Meskipun pemotongan bantuan domestik di NM berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan dan PDB Indonesia, tetapi beberapa produksi dan harga-harga komoditas pertanian pangan dan harga-harga masukan pertanian dapat meningkat, sehingga pendapatan petani komoditas-komoditas dan pemilik sumberdaya pertanian ini dapat meningkat. Peningkatan pendapatan petani ini selanjutnya berpotensi meningkatkan pendapatan pedesaan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Oleh karena itu, Indonesia, seyogyanya aktif dalam perundingan bilateral dan multilateral untuk mendesak agar bantuan domestik di NM ini dihapus.

PENDAHULUAN

Sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia/OPD atau *World Trade Organization/WTO*, Indonesia telah meratifikasi pembentukan OPD berdasarkan UU No. 7 tahun 1994 dan telah menerima Perjanjian Pertanian/PP serta meratifikasi beberapa produk pertanian dalam *the national schedules of commitments*. Sejak tahun 1995 sampai sekarang Indonesia juga telah menotifikasi produk pertanian ke OPD dengan data yang berasal dari berbagai sektor, khususnya sektor pertanian (Sawit 2003).

Perundingan pertanian di OPD hampir tidak mengalami kemajuan sejak dihasilkannya kerangka kerja Paket Juli (*July Package*) pada tahun 2004. Perundingan sektor pertanian tetap berjalan sulit, bahkan sampai saat Konferensi Tingkat Menteri (KTM) VI di Hongkong yang telah berlangsung pada Desember 2005 yang lalu. Perundingan pertanian adalah perundingan yang paling kompleks dan sulit. Muatan isu pertanian tidak hanya menyentuh bidang ekonomi tetapi juga sarat dengan muatan politis dan sosial. Kualitas masalah sosial dan politis disebabkan sebagian besar penduduk dunia terlibat di dalam beragam masalah sosial dan kemiskinan. Di sisi lain NM yang tergabung dalam OECD memberikan subsidi yang terbesar, yakni mencapai 320 milyar dolar AS per tahun sehingga kondisi ini menyebabkan distorsi perdagangan (*trade distorting*) di bidang produk pertanian.

Semua negara masih ingin memproteksi pertaniannya dengan berbagai cara dengan BD, SE atau menaikkan tarif. Itu sebabnya agenda Doha mengeluarkan mandat, yakni pertama peningkatan akses pasar (*market access*); kedua mengurangi atau menghapus segala bentuk SE (*export subsidies/ES*); ketiga, mengurangi subsidi domestik/SD (*domestic subsidy*) atau Bantuan Domestik/BD (*domestic support/DS*); keempat disepakatinya pemberian perlakuan khusus dan berbeda untuk negara berkembang. Dari keempat aspek yang diuraikan diatas, makalah ini akan lebih memfokuskan pada aspek pengurangan BD di NM, karena BD

merupakan salah satu kebijakan yang mendistorsi perdagangan komoditas pertanian dunia, sebagaimana disuarakan NB. Penelitian yang dilakukan Hoekman, Ng dan Olarreaga (2004), Hertel dan Keeney (2006) dan Anderson dan Velenzuela (2005) memang pernah menunjukkan bahwa manfaat pemotongan bantuan domestik di NM terhadap NB mungkin sangat kecil dibandingkan manfaat potensial dari pemotongan hambatan akses pasar. Dalam bahasa lain Burfisher (2001) mencatat bahwa tarif dan kuota tarif mendistorsi pasar lebih kuat daripada bantuan domestik dan subsidi ekspor. Bahkan Rae dan Strutt (2003) mencatat bahwa perkembangan perdagangan berkembang dan manfaat kesejahteraan secara berarti dapat dicapai meskipun bantuan domestik diabaikan dalam kesepakatan multilateral. Tampaknya ini merupakan suatu pendapat arus utama saat ini, sehingga secara potensial memberikan implikasi bahwa isu bantuan domestik dan subsidi ekspor tidak perlu menjadi titik perhatian dalam sidang-sidang OPD. Namun, meskipun hasil-hasil penelitian mereka ini benar, Indonesia tetap memerlukan informasi tentang seberapa besar manfaat yang akan diperoleh itu dan melalui komoditas-komoditas apa saja.

Makalah ini ditujukan untuk menganalisis (*ex ante*) pengaruh pemotongan atau bahkan penghapusan BD yang dilakukan NM terhadap kinerja komoditas pangan Indonesia, meskipun para penulis menyadari bahwa analisis tentang implikasi perubahan subsidi domestik bukanlah pekerjaan mudah karena isu pengukuran besarnya subsidi domestik dan pemodelannya serta kerumitan yang terkait dengan program bantuan domestik di berbagai negara.

II. METODE PENELITIAN

2.1. Kerangka Pemikiran

Bantuan Domestik dapat muncul dalam empat bentuk yang biasa disebut empat kotak (*box*): Kotak Jingga/KJ (*Amber Box/AB*), Kotak Biru/KB (*Blue Box/BB*), Kotak Merah/KM (*Red Box/RB*) dan Kotak Hijau/KH (*Green Box/GB*). Yang tergolong bantuan domestik KH adalah

bantuan pemerintah yang tidak mendistorsi perdagangan dan merupakan kebijakan, yang terwujud dalam berbagai macam kegiatan seperti: (i) penelitian, (ii) penyuluhan, (iii) inspeksi pemasaran dan promosi, (iv) pembangunan infrastruktur, (v) stok pangan dalam mendukung ketahanan pangan, bantuan pangan domestik, (vi) asuransi tanaman, (vii) skim jaringan pengamanan sosial atau pendapatan, (viii) penggantian pendapatan karena adanya bencana alam, (ix) program pensiun, dan (x) program lingkungan (WTO 1999). Untuk NB diberi keleluasaan dalam bentuk subsidi masukan dan fasilitas pembangunan pertanian dan pedesaan. Sedangkan KB adalah kebijakan pemberian bantuan langsung kepada para petani yang digunakan dalam program pembatasan produksi. Kebijakan ini umumnya dilakukan oleh NM, sementara bantuan domestik Indonesia selama ini dapat digolongkan sebagai KH dan KB. Penelitian ini mencoba menduga dampak yang timbul akibat diberlakukannya kebijakan pemotongan KJ di NM.

Di pilar Bantuan Domestik/BD (*Domestic Support/DS*), BD dibagi menjadi 3 jenjang untuk pengurangan dalam *Final Bound Total AMS* dan pemotongan *trade-distorting domestic support* secara keseluruhan, dengan cara semakin tinggi jenjang maka pemotongannya semakin besar secara linear. Dalam dua kasus tersebut anggota yang memberikan BD besar akan berada di jenjang teratas, semua NB akan berada di jenjang paling bawah. Selain itu diusulkan juga pengetatan penggunaan KB dan peninjauan kembali serta klarifikasi kriteria penggunaan KB.

Sebagaimana diketahui NM telah mengubah kebijakan yang sebelumnya mereka lakukan yakni pembatasan produksi ke arah pemberian imbalan kepada petani mereka secara langsung akibat hilangnya pendapatan usahatani pada suatu pasar yang kita ketahui tidak mungkin menutupi biaya produksinya (Hutabarat et al. 2004). Padahal menurut Pasal VI GATT 1947 apabila suatu produk dijual di pasar negara lain di bawah harga produksinya, maka tindakan ini disebut

"dumping". "Dumping" NM terjadi antara lain karena subsidi ekspor menutupi perbedaan harga domestik yang tinggi dengan harga dunia yang rendah (misalnya gula dan produk susu di UE); dan pembayaran langsung menutupi biaya produksi yang tinggi dan harga dunia yang rendah (misalnya sereal di UE). Harga domestik dan campurtangan pemerintah dalam perdagangan di antara negara-negara produsen dan yang terlibat dalam perdagangan selalu mempunyai pengaruh nyata pada harga dunia, yakni semakin tinggi tingkat perlindungan bagi produk yang diimpor dan semakin tinggi subsidi ekspor, maka akan semakin rendahlah harga dunia yang di hadapi NB pengeksport dan pengimpor (Valdes dan Foster 2003).

Di Amerika Serikat selama sepuluh tahun terakhir, komoditas-komoditas jagung, kapas, gandum, beras, dan kedelai yang dijual di pasar NB pada harga jagung sekitar 5-35 persen, kapas 20-55 persen, gandum 20-35 persen, beras 15-20 persen, dan kedelai 8-30 persen di bawah biaya produksinya masing-masing (ActionAid 2004). Hal yang serupa terjadi di UE. Saat ini, gandum dijual 30-35 persen, gula 60-70 persen, dan bubuk susu skim 50 persen dibawah biaya produksi masing-masing. Gopinath et al. (2004) menghitung untuk UE dugaan dukungan produsen lebih dari dua kali dukungan untuk AS, meskipun nilai produksi pertanian UE hanya 30 persen di atas nilai produksi pertanian AS. Selanjutnya Espoti (2007) mengatakan bahwa hampir 45 persen anggaran tahunan UE yang besarnya sekitar 95 milyar Euro pada tahun 2000 dibelanjakan untuk kebijakan Kebijakan Pertanian Bersama/KPB atau *Common Agricultural Policy/CAP* dan sekitar 25 persen untuk kebijakan struktural ditujukan khususnya untuk mendukung kawasan-kawasan tertinggal. Sebahagian besar anggaran KPB itu (antara 85 sampai 90 persen) dihabiskan untuk pembayaran langsung kepada petani atau dukungan pasar (yang saat ini disebut Pilar Pertama KPB), sedangkan sisanya 10 sampai 15 persen di arahkan untuk Kebijakan Pembangunan Pedesaan/KPP atau Rural

Development Policies/RDP (yang disebut Pilar Kedua KPB) [Esposti 2007].

2.2. Analisis Data dan Jenis Data

2.2.1. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan perangkat lunak Model Proyek Analisis Perdagangan Global (*Global Trade Analysis Project/GTAP Modeling*)¹. Pemilihan metode atau alat analisis didasarkan pada korelevansi masalah dan ketersediaan data dan informasi untuk menjawab masalah. Model GTAP yang digunakan dalam penelitian ini adalah GTAP versi 6 yang menggunakan data-data tahun 2001 oleh *Center for Global Trade Analysis*, Purdue University, Indiana, AS. Analisis GTAP merupakan salah satu dari paket model CGE yang dapat dipergunakan untuk melihat dampak perdagangan (tarif, subsidi ekspor, dll) dalam kerangka: (1) satu negara (*single country*) dan (2) *multi market, multi country* (banyak pasar atau negara).

Andaian-andaian utama yang dipakai model GTAP ini antara lain adalah: (1) struktur pasar (persaingan sempurna), (2) fungsi produksi berskala penerimaan tetap atau *constant returns to scale*, (3) rumah tangga wakil (*representative household*) berperilaku memaksimalkan kepuasan, (4) pemerintah berperilaku sama seperti rumah tangga wakil, (5) antara produk domestik dan produk impor dapat saling menggantikan secara sempurna (andaian Armington), (6) terjadi investasi dan dinamika ekonomi, (7) semua faktor produksi termanfaatkan (tenaga kerja semuanya terserap), sehingga model menjadi tertutup, (8) kesejahteraan sosial adalah kesejahteraan rumah tangga wakil (lihat Hertel 1997).

Andaian-andaian ini merupakan kekuatan sekaligus kelemahan model GTAP ini juga. Pertama, beberapa sektor di beberapa negara dapat bercorak persaingan tidak sempurna dan berekonomi skala atau *economy of scale*. Kedua, andaian Armington menutup kemungkinan peralihan lokasi perusahaan,

karena produk yang saling bersaing adalah sama di seluruh kawasan dan yang membedakannya adalah asal usul negaranya. Ini mengabaikan kenyataan bahwa ada faktor mutu yang lebih menentukan keputusan pengimporan barang selain faktor harga. RT yang mempunyai pendapatan tinggi biasanya lebih peduli terhadap mutu dan kalau ini tidak diperhitungkan maka dugaan-dugaan yang berkaitan dengan pengaruh pendapatan akan bias. Ketiga, pengaruh varietas atau jenis produk terabaikan. Keempat, penggunaan sektor perbankan global semata-mata karena data investasi bilateral dan pemilikan tidak tersedia. Kelima tidak membedakan perlakuan terhadap investasi domestik dan asing. Keenam, tidak cocok menganalisis isu yang berkaitan dengan susunan belanja pemerintah. Ketujuh, isu pasar tenaga kerja (antara lain pengangguran) tidak dapat atasi dengan baik. Valenzuela et al. (2007) di dalam salah satu tulisan mereka mengatakan bahwa model GTAP juga tidak selalu sempurna menggambarkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada, termasuk perusahaan pemerintah atau badan usaha atau perdagangan milik negara. Keterbatasan lain adalah terkait dengan masuknya faktor produksi lahan yang mempunyai elastisitas pergantian berpasangan yang sama terhadap modal dan TK.

Di dalam penelitian ini, para penulis menggunakan agregasi 8 negara/kelompok negara dan 16 komoditas. Adapun negara/agregasi negara adalah sebagai berikut :

- (1) Jepang,
- (2) Korea,
- (3) Amerika Serikat/AS,
- (4) Uni Eropa/UE,
- (5) Negara Maju/NM Lainnya,
- (6) Indonesia,
- (7) G-33 (sesuai dengan ketersediaan negara di program GTAP),
- (8) Sisa dari dunia.

Sedangkan dari 16 komoditas tersebut yang dimasukkan ke dalam sektor pertanian berjumlah 13 komoditas, yang dilambangkan dalam nama peubah yang terdapat dalam tanda kurung, yaitu :

¹ Para penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Fwidodo, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Perdagangan yang telah memberi izin kepada para penulis untuk menggunakan Paket Program GTAP Versi 6.0 ini.

- (1) Padi dan Olahannya, untuk **Padi** (Padi_Olah)
- (2) Gandum, untuk **Gandum** (Gandum)
- (3) Serealia lainnya, untuk **Jagung** (Jagung)
- (4) Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan, untuk **Sayuran dan Kelapa (segar/kering)** (Horti)
- (5) Biji-bijian Mengandung Minyak, untuk **Kedelai** (Kedelai)
- (6) Gula dari berbagai Tanaman (Tebu, Bit), untuk **Gula/tebu** (Gula_Tebu)
- (7) Tanaman Jenis Fibers, untuk **Kapas atau rami** (Kapas_Rami)
- (8) Ternak Hidup dan Dagingnya dari Sapi, Kambing, Domba dan Kuda, untuk **Ruminansia/sapi** (Sapi_Dmb_Dag)
- (9) Ternak lainnya (ternak hidup dan lainnya) termasuk unggas, untuk **unggas** (Ayam_Telur)

based) dan modal (*capital-based*) yang terdapat dalam subsidi faktor input (*FBED*). Namun, dari paket program yang tersedia dalam GTAP Versi 6.0 goncangan (*shock*) yang dapat dilakukan hanya terbatas pada tingkat subsidi keluaran (*rTO*) atau *OSEP*. Ini salah satu kelemahan GTAP Versi 6.0 ini. Oleh karena itu dalam simulasi ini, pemotongan bantuan domestik diterjemahkan sebagai pemotongan KJ saja, yang sebetulnya merupakan salah satu bagian kecil dari subsidi domestik, sehingga dalam penelitian ini yang dimaksud dengan bantuan domestik dalam model GTAP Versi 6.0 adalah subsidi untuk KJ itu. Sampai saat sebelum pertemuan di Vevey, Swiss tanggal 27 – 30 November 2006 yang lalu telah ada empat usulan pemotongan bantuan domestik (**Tabel 2.1**).

Tabel 2.1. Skenario Pemotongan Bantuan Domestik

Jenjang/Tingkat bound	Usulan K 20	Usulan USA	Usulan UE	KTM Hongkong
1. > 60 milyar dolar AS	80 %	75 %	70 %	70-80 % UE
2. 10-60 milyar dolar AS	75 %	53 %	60 %	53-75 % AS dan Jepang
3. 0-10 milyar dolar AS	70 %	31 %	50 %	31-70% NM Lainnya

- (10) Susu dan produk olahannya, untuk **Susu dan produk olahannya** (Susu_Olahan)
- (11) Pertanian lainnya, untuk **Pala, dan Vanili** (Pertan_Lain)
- (12) Produk Minyak Nabati, untuk **Kelapa (kopra), dan kedelai (minyak)** (Minyak Nabati)
- (13) Produk Makanan Olahan, untuk **Kakao** (Olah Makanan)

Dalam melakukan simulasi model GTAP, menurut Rae dan Strutt (2003) instrumen dalam penyesuaian tiga jenis BD dilakukan melalui KB, KH dan KJ adalah sebagai berikut : Kotak Jingga/KJ (*Amber Box/AB*) diproksi dengan subsidi output (*OSEP*) dan subsidi input antara (*ISEP*); Kotak Biru/KB (*Blue Box/BB*); dan Kotak Hijau/KH (*Green Box/GB*) diproksi dengan subsidi input lahan (*land-*

Kemudian dalam pertemuan di Vevey ada usulan yang ditawarkan saat sidang, yakni:
 Usulan 1: UE (70%), AS (60%) dan negara lainnya (50%)
 Usulan 2: UE (70%), AS (60%) dan negara lainnya (55%)
 Usulan 3: UE (80%), AS (> 80%) dan negara lainnya (60%).

Dengan menggabungkan usulan-usulan tersebut, maka para penulis merumuskan empat skenario pemotongan untuk disimulasikan dalam model, yaitu:

Skenario A: Usulan K 20: > 60 milyar dolar AS (80% untuk UE); 10-60 milyar dolar AS (75% untuk AS dan Jepang); dan 0-10 milyar dolar AS (80% untuk NM Lainnya)

Skenario B: Usulan UE: > 60 milyar dolar AS (75% untuk UE); 10-60 milyar dolar AS (53% untuk AS dan Jepang); dan 0-10 milyar dolar AS (50% untuk NM Lainnya)

Skenario C: Usulan USA: > 60 milyar dolar AS (70% untuk UE); 10-60 milyar dolar AS (60% untuk AS dan Jepang); dan 0-10 milyar dolar AS (50% untuk NM Lainnya)

Skenario D: Hasil KTM Hongkong (minimal), yakni pemotongan terendah di dalam Tabel 3.1; > 60 milyar dolar AS (70% untuk UE); 10-60 milyar dolar AS (53% untuk AS dan Jepang); dan 0-10 milyar dolar AS (31% untuk NM Lainnya).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Produk Pertanian yang Mendapatkan Bantuan Domestik

Berdasarkan data *GTAP* Versi 8.0, berbagai produk terutama produk pangan dunia sangat dipengaruhi oleh bantuan domestik atau dalam hal ini KJ. Sebagai catatan, (1) tidak semua produk atau kelompok produk yang didefinisikan pada Bab Metodologi dimasukkan dalam tabel untuk menghemat halaman dan untuk memusatkan perhatian pada produk pangan dan (2) tidak semua negara juga melaporkan secara jujur besaran bantuan domestik yang dikeluarkannya bagi setiap produk dan pada umumnya juga bantuan domestik ini dinilai terlalu rendah dari nilai yang sesungguhnya, meskipun hal ini sulit dibuktikan. Dari sebanyak 8 negara/kelompok negara, empat diantaranya memberikan subsidi (subsidi domestik bernilai positif dalam **Tabel 3.1**) ke produk pertaniannya dan selainnya malah mengenakan pajak (sedangkan kalau bernilai negatif adalah pajak domestik) terhadap produk pertaniannya (subsidi domestik bernilai positif dalam **Tabel 3.1**, sedangkan kalau bernilai negatif adalah pajak domestik). Beberapa hal yang menarik dicatat dari **Tabel 3.1** antara lain adalah bahwa: (1) dengan pengecualian Korea, hampir semua negara maju/NM memberikan subsidi bagi produk pertaniannya dan jumlah subsidi ini sangat

besar, (2) sebaliknya, hampir semua negara berkembang/NB (Indonesia, Kelompok 33/K 33 atau G 33, sisa negara lainnya) malah mengenakan pajak terhadap produk pertaniannya, (3) Jepang, UE dan AS membelanjakan bantuan domestik yang sangat besar kepada komoditas biji-bijian mengandung minyak (kedelai), (3) AS dan Jepang memberi subsidi bagi padi dan produk olahannya, tetapi nilai subsidi beras AS sangat besar, sementara UE malah mengenakan pajak atasnya, dan (4) hampir semua produk pangan di NM mendapat

3.2. Simulasi Dampak Pemotongan Subsidi Domestik Negara Maju terhadap Kinerja Sektor Pertanian

Analisis dampak penurunan Subsidi Domestik/SD atau Bantuan Domestik/BD dalam penelitian ini dilakukan melalui simulasi dengan bantuan program komputer *GTAP Version 6*. Hasil-hasil analisis yang dicantumkan dalam tabel dan menjadi pokok pembahasan adalah hanya enam kelompok komoditas yang digolongkan sebagai produk pangan, yaitu Padi dan Olahannya, Gandum, Sereal lainya (seperti Jagung), Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan (Produk Hortikultura), Biji-bijian Mengandung Minyak (seperti Kedelai), Gula dari berbagai Tanaman (Tebu, Beet). Dampak penghapusan BD hanya diamati dalam indikator-indikator penting, seperti: (i) perubahan harga (masukan dan keluaran) pertanian, (ii) produksi, (iii) neraca perdagangan, (iv) impor, (v) permintaan rumah tangga Indonesia, (vi) PDB, dan (vii) kesejahteraan.

3.2.1. Dampak Terhadap Harga-harga

3.2.1.1. Masukan Pertanian

Hasil simulasi menunjukkan perbedaan yang jelas dalam perubahan harga-harga masukan antara NM (yang diwakili AS dan UE) dan NB (yang diwakili Indonesia dan K 33) akibat pemotongan subsidi domestik di NM (**Tabel 3.2**). Hal ini ditunjukkan oleh semua skenario yang dicoba. Sementara harga lahan dan upah tenaga kerja/TK tak terampil menurun di NM, keadaan sebaliknya justru terjadi di NB. Hal ini berkaitan dengan

dekapitalisasi faktor produksi lahan dan jasa TK tak terampil di bidang pertanian yang akan terjadi di NM. Selama ini nilai lahan dan upah TK pertanian tak terampil di NM memang meningkat, karena harga produk pertanian yang dihasilkan faktor produksi lahan dan TK tak terampil dengan sengaja dibuat tinggi, di

produksi pertanian semakin menguntungkan dan selanjutnya mendorong peningkatan permintaan lahan dan TK tak terampil. Peningkatan permintaan terhadap kedua faktor ini mendorong harga-harganya meningkat. Peningkatan harga lahan dan upah

Tabel 3.1. Tingkat Bantuan Domestik (Subsidi Keluaran), Awal Sebelum Simulasi Tiap Komoditas di Setiap Negara (%)

Nama Sektor Agregat	Pertanian	Jepang	Korea	AS	Uni Eropa	Negara Maju Lainnya	Indonesia	K 33	Sisa Negara Lainnya	Total
1 Padi dan Olahannya	Padi Olah	2.1	0	24.7	-0.1	0	-0.6	0.2	0	26.4
2 Gandum	Gandum	0	0	3.6	0.3	0.7	-1.3	5	0.6	8.9
3 Sereal lainnya	Jagung	1.5	0	6.7	0.2	3.5	-1.3	-1.2	0.5	10
4 Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan	Horti	0.1	0	4.3	0.4	0.3	-0.9	-0.9	-2.0	1
5 Bij-bijian Mengandung Minyak	Kedelai	46.9	0	28.8	35.7	0.5	-9	1.6	-0.9	110.7
6 Gula dan berbagai Tanaman (Tebu, Beet)	Gula, Tebu	0	0	22	0	0	-6.6	-0.6	-0.8	-7.7
7 Produk Pertanian yang lain		-30.3	-17.4	-12.6	28	-3	-11	-22.7	-16.4	-71.2
	Total	19.3	-17.4	77.5	64.6	2	-30.7	-16.6	-19.3	78.1

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Subsidi pemerintahnya telah persentase paling tinggi terhadap di AS, sedangkan di NB umumnya tidak ditemukan, walaupun ada persentasenya sangat kecil.

atas harga yang seharusnya untuk membantu petani mereka. Peningkatan nilai produk ini didorong oleh subsidi domestik. Jadi, kalau subsidi domestik dipotong, dalam jangka pendek harga-harga produk pertanian semakin menurun. Penurunan harga ini selanjutnya membuat investasi di bidang pertanian akan menurun dan akibatnya harga lahan dan upah TK tak terampil pertanian juga menurun.

Sedangkan di NB (Indonesia dan K 33) terjadi keadaan sebaliknya, di mana faktor produksi lahan dan TK tak terampil menjadi terkapitalisasi. Artinya, masyarakat memandang bahwa investasi di bidang

TK Tak Terampil di NB juga diprakirakan oleh hasil analisis Anderson dan Martin (2005).

Hal berbeda terjadi pada faktor produksi TK terampil pertanian, dimana semua skenario menunjukkan bahwa di manapun wilayahnya, upah mereka tidak banyak berubah atau berubah hanya dalam persentase yang sangat kecil, sekitar 0.2 persen (Tabel 3.2). Ini dapat dikaitkan pada tingkat teknologi pertanian di ke dua kelompok. Di NM yang dicirikan pertanian dengan basis alat dan mekanisasi pertanian serta sarana teknologi yang mutakhir dan padat modal tentu mempunyai perpaduan tingkat teknologi dan TK terampil yang tetap,

Tabel 3.2. Pengaruh Pemotongan Subsidi Domestik terhadap Perubahan Harga-harga Masukan (%)

Skenario	Masukan	Harga Masukan di Negara/Kelompok Negara			
		AS	UE	Indonesia	K 33
A. Usulan K 20	Lahan	-10.05	-6.15	1.26	1.09
	TK Tak Terampil	-0.02	-0.01	0.11	0.05
	TK Terampil	0.00	0.02	0.02	0.00
	Modal	-0.02	0.01	0.05	0.01
	Sumber Daya Alam	0.15	-0.05	-0.21	-0.21
B. Usulan AS	Lahan	-6.93	-6.46	0.96	0.82
	K Tak Terampil	-0.01	-0.02	0.09	0.04
	TK Terampil	0.00	0.01	0.02	0.00
	Modal	-0.01	0.00	0.04	0.01
	Sumber Daya Alam	0.09	-0.01	-0.17	-0.16
C. Usulan UE	Lahan	-7.97	-5.61	1.04	0.89
	TK Tak Terampil	-0.02	-0.01	0.09	0.04
	TK Terampil	0.00	0.01	0.02	0.00
	Modal	-0.02	0.01	0.04	0.01
	Sumber Daya Alam	0.11	-0.03	-0.18	-0.17
D. KTM Hongkong (Minimal)	Lahan	-6.99	-5.91	0.94	0.80
	TK Tak Terampil	-0.01	-0.01	0.09	0.04
	TK Terampil	0.00	0.01	0.02	0.00
	Modal	-0.01	0.00	0.04	0.01
	Sumber Daya Alam	0.09	-0.02	-0.17	-0.16

Sumber: GTAP Data Base (diolah)

sehingga perubahan yang terjadi dalam harga-harga akan sulit mengubah perpaduan teknologi dan TK terampilnya, sehingga dengan demikian upah mereka juga tidak akan berubah. Sementara di NB dengan ciri pertanian dengan alat-alat sederhana dan bahkan mekanisasi sangat terbatas serta teknologi dan modal terbatas pula dipastikan belum memperhitungkan sumbangan TK terampil, sehingga perubahan harga-harga yang terjadi belum tentu mampu mengubah perubahan permintaan terhadap TK terampil ini.

Bagi faktor produksi modal, pemotongan BD di NM memberi pengaruh yang jelas berbeda juga antara di AS di satu pihak dan di

UE, Indonesia dan K 22 di pihak lain untuk semua usulan. Dengan berbagai usulan pemotongan subsidi domestik yang ada saat ini di AS terjadi penurunan nilai jasa modal, sedangkan di Indonesia, UE dan K 33 terjadi peningkatan nilai jasa modal. Ini mungkin dapat terjadi karena usaha pertanian di AS jauh lebih padat modal dibandingkan dengan usaha pertanian di UE, apalagi jika dibandingkan dengan Indonesia dan K 33. Oleh karena itu pemotongan subsidi domestik membuat potensi kegiatan produksi pertanian dan investasi pertanian di AS menurun, sementara di Indonesia, UE dan K 33 meningkat.

Dari besaran dampak perubahan terlihat bahwa usulan AS memberikan dampak yang lebih rendah dari pada usulan-usulan yang lain, kecuali terhadap harga-harga masukan di UE. Tampak terlihat di sini bahwa AS ingin mendorong perubahan harga-harga yang lebih cepat di UE. Yang tidak dapat dijelaskan dengan mudah adalah mengapa di AS harga faktor produksi sumberdaya alam lain menurun, sementara di Indonesia, UE dan K 33 meningkat? Barangkali ini terkait dengan peningkatan ketersediaan faktor produksi ini yang semakin banyak akibat terbebasnya dari kegiatan produksi pertanian.

Dari tiga faktor produksi yang menurun harganya di NM, lahan yang mengalami penurunan tertinggi, sedangkan di NB dari empat faktor produksi yang meningkat harganya lahan juga yang mengalami paling besar. Yang menarik juga diamati dari **Tabel 3.2** adalah bahwa perubahan harga faktor produksi sumberdaya alam lain bertentangan arah dengan harga faktor produksi lahan, TK tak terampil dan modal di AS, Indonesia dan K 33, sementara di UE arah perubahannya searah dengan faktor produksi lahan dan TK tak terampil.

3.2.1.2. Keluaran Pertanian

Penurunan BD juga berpengaruh pada harga komoditas pertanian, baik di NM maupun NB. Semua usulan pemotongan subsidi domestik memprakirakan harga-harga semua produk yang dipertimbangkan meningkat di Indonesia, AS dan K 33 (**Tabel 3.3**). Peningkatan harga pertanian di AS umumnya lebih besar dibandingkan dengan peningkatan harga di UE dan NB. Sebagai contoh, dalam skenario KTM Hongkong, NM yang banyak memberikan subsidi pangan seperti pada Padi, memperlihatkan harga Padi (AS) naik sebesar 9,5-13,5 persen dibandingkan dengan harga Padi (Indonesia) yang hanya meningkat sebesar 0,32-0,43 persen. Namun, peningkatan atau penurunan harga-harga keluaran tidak begitu terasa di UE kecuali untuk Biji-bijian Mengandung Minyak.

Untuk Gandum, Sereal lainnya dan Sayuran semua usulan memprakirakan harga-harganya menurun di UE. Hal ini berbeda dari

hasil yang didapatkan Burfisher (2001) yang menyatakan bahwa penghapusan distorsi kebijakan perdagangan pertanian dan domestik dapat meningkatkan harga-harga pertanian dunia sekitar 12 persen, karena tarif impor menekan permintaan impor dan bantuan domestik dan subsidi ekspor mendorong penawaran berlebihan, sehingga secara bersamaan akan menekan harga-harga pertanian dunia.

Sebagaimana dijelaskan pada Anakbab Kerangka Pemikiran, AS diketahui mengeluarkan subsidi domestik untuk hampir semua produk pangannya. Dengan subsidi ini, petani atau perusahaan pertanian pangannya tidak akan pernah menderita kerugian dari pengaruh penurunan harga dunia dan karena petani atau perusahaan pertanian pangannya tidak merasakan kerugian ini mereka tetap berada dalam jalur bisnis produksi bahan pangan dan tetap memasok produksi ini ke pasar dunia. Dalam hal ini harga yang diterima petani tetap tinggi meskipun biaya produksinya tinggi dan harga dunianya rendah. Pada tahun 1996, AS menghapus sistem harga sasaran atau *target prices* dan pembayaran tambahan atau *deficiency payments* untuk produk-produk pokok serta areal peruntukan untuk mengendalikan pasokan atau *set-aside program*. Meskipun program-program ini dihapus, ada beberapa program baru yang menggantikannya seperti pembayaran tetap atau darurat atau *fixed and emergency payments* dan harga-harga dasar atau *floor prices* dalam bentuk bunga pinjaman pembayaran tambahan atau *loan rate with deficiency payments* tetap dipertahankan untuk produk-produk pokok, sementara kebijakan sektor pergulaan di UE dan AS hanya mengalami sedikit perubahan sejak 1996 (Gopinath et al. 2004). Oleh karena itu apabila subsidi domestik ini dipotong, beberapa petani atau perusahaan pertanian produk pangan tidak mustahil akan keluar dari jalur bisnis produksi pertanian pangan, sehingga volume produksi komoditas pangan akan menurun dan pada giliran yang selanjutnya dapat mendorong peningkatan harga-harga produk pangan di AS.

Tabel 3.3. Pengaruh Pemotongan Subsidi Domestik terhadap Perubahan Harga-harga Keluaran (%)

Skenario	Kelompok Produk/Harga	Produk di Negara/Kelompok Negara			
		AS	UE	Indonesia	K.33
A. Usulan K 20	Padi dan Olahannya	13.50	0.16	0.43	0.24
	Gandum	0.73	-0.01	0.49	0.25
	Sereal lainnya	3.26	-0.10	0.63	0.29
	Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan	1.54	0.00	0.52	0.25
	Biji-bijian Mengandung Minyak	13.21	20.10	2.77	0.99
	Gula dari berbagai Tanaman (Tebu, Beet)	0.10	0.01	0.20	0.18
	B. Usulan AS	Padi dan Olahannya	9.55	0.10	0.33
Gandum	0.53	-0.06	0.38	0.18	
Sereal lainnya	2.32	-0.15	0.47	0.21	
Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan	1.12	-0.05	0.40	0.19	
Biji-bijian Mengandung Minyak	9.46	18.68	2.05	0.74	
Gula dari berbagai Tanaman (Tebu, Beet)	0.08	-0.01	0.16	0.14	
C. Usulan UE	Padi dan Olahannya	10.79	0.12	0.35	0.20
	Gandum	0.58	-0.02	0.40	0.20
	Sereal lainnya	2.62	-0.11	0.51	0.23
	Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan	1.24	-0.02	0.42	0.21
	Biji-bijian Mengandung Minyak	10.61	17.54	2.25	0.81
	Gula dari berbagai Tanaman (Tebu, Beet)	0.08	0.00	0.17	0.15
	D. KTM Hongkong (Minimal)	Padi dan Olahannya	9.54	0.10	0.32
Gandum		0.52	-0.04	0.36	0.18
Sereal lainnya		2.32	-0.13	0.46	0.21
Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan		1.11	-0.04	0.39	0.19
Biji-bijian Mengandung Minyak		9.42	17.47	2.03	0.73
Gula dari berbagai Tanaman (Tebu, Beet)		0.08	-0.01	0.15	0.14

Sumber: GTAP Data Base (1994).

Bagi UE yang diketahui memberikan subsidi domestik untuk produk-produk gula, serealia, sayuran dan buah-buahan dampaknya adalah penurunan harga-harga produk tersebut (**Tabel 3.3**). Hal ini terjadi karena Kebijakan Pertanian Bersama/KPB UE atau *EU Common Agricultural Policy/CAP* melalui gabungan instrumen subsidi domestik dan ekspor serta kuota tarif, dirancang sedemikian rupa untuk membuat harga di UE lebih tinggi dari harga dunia. Dengan pemotongan subsidi domestik, dukungan kepada komoditas-komoditas pertanian seperti ini semakin berkurang dan akibatnya terjadi pengalokasian sumberdaya pertanian dan restrukturisasi usaha pertanian yang mendorong produksi pertanian meningkat, yang selanjutnya mendorong harga-harganya semakin menurun. Selain itu penurunan harga ini mungkin berkaitan juga dengan pengalihan bentuk harga dukungan atau harga intervensi ke bentuk sumbangan langsung kepada petani yang meningkat seperti yang dicatat Gopinath et al. (2004).

Akan halnya di NB (Indonesia dan K 33), yang pada umumnya tidak memiliki subsidi domestik peningkatan harga-harga memang harus terjadi, karena harga-harga yang terjadi selama ini di dalam negeri negara-negara ini tertekan harga dunia yang rendah akibat surplus produk pertanian NM di pasar dunia.

Dari enam kelompok produk yang dipertimbangkan, semua usulan pemotongan subsidi domestik memprakirakan harga Padi dan Olahannya di AS memperoleh peningkatan harga yang paling tinggi, sedangkan di UE, Indonesia dan K 33 semua usulan memprakirakan harga Biji-bijian Mengandung Minyak yang meningkat paling besar. Yang perlu juga dicermati adalah, peningkatan harga kelompok produk ini selalu lebih tinggi daripada kelompok produk lain di UE. Hal ini merupakan akibat dari pelaksanaan program bahan bakar bio yang memang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan peningkatan kebutuhan bahan pakan untuk ternak-ternak di UE. Ini sebenarnya menjadi potensi besar bagi Indonesia, tetapi pengembangan komoditas-komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan

ini sangat sulit baik dilihat dari sisi pengimpor dan di dalam negeri sendiri, misalnya pada kelapa sawit dan ubikayu. Berbagai upaya dilakukan UE untuk menghadang kedua produk ini agar tidak mudah masuk ke UE dengan hambatan tarif dan bukan tarif seperti memasukkan isu lingkungan. Untuk itu, Indonesia perlu mencermati perubahan ini secara konsisten.

Harga komoditas sayuran di Indonesia naik 0,39-0,52 persen, dan tanaman pangan seperti Padi dan Kedelai naik masing-masing 0,32-0,43 persen dan 2,03-2,77 persen. Dengan demikian terlihat bahwa komoditas Kedelai sangat peka terhadap penurunan bantuan domestik NM yang ditunjukkan oleh nilai peningkatan harga yang terbesar (2,03-2,71 persen) dibandingkan dengan komoditas lainnya. Contohnya negara AS, peningkatan harga Kedelai lebih besar dari di Indonesia yaitu 9,42-13,21 persen dan di UE mencapai 17,47-20,10 persen. Di antara ke empat usulan, usulan K 20 memberikan dampak yang paling besar dari usulan-usulan lainnya.

3.2.2. Dampak Terhadap Keluaran/Produksi

Dengan melakukan simulasi pada beberapa skenario yang telah disebutkan sebelumnya, hasil yang diperoleh berbeda antar komoditas dan ini terjadi di semua usulan. Bagi NM seperti AS akan sangat terpuak dengan skenario penurunan subsidi ini, karena produksi semua produk pangannya mengalami penurunan (**Tabel 3.4**). Dampak lanjutan dari penurunan produksi ini adalah harga-harga produk pangan di pasar domestik AS akan meningkat, seperti dijelaskan pada bahasan sebelumnya. Yang paling menonjol penurunannya adalah Padi dan Biji-bijian Mengandung Minyak atau Kedelai. Bagi EU, semua usulan pemotongan BD hanya menurunkan produksi Biji-bijian Mengandung Minyak atau Kedelai, sementara produksi komoditas pangan lain meningkat. Peningkatan ini tentu akan menyebabkan harga-harga produk.

Selain Biji-bijian Mengandung Minyak akan menurun sebagaimana diperoleh pada hasil pada **Tabel 3.3**. Tidak mustahil juga

Tabel 3.4. Pengaruh Pemotongan Subsidi Domestik terhadap Perubahan Kaluaran/Produksi Pertanian (%)

Skenario	Kelompok Produk	Perubahan Produksi di Negara/Kelompok Negara			
		AS	UE	Indonesia	K 33
A. Usulan K 20	Padi dan Olahannya	-22.01	3.36	0.03	0.23
	Gandum	-2.00	0.92	-0.29	0.08
	Sereal lainya	-1.19	0.60	0.16	0.22
	Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan	-1.21	0.40	-0.08	-0.01
	Biji-bijian Mengandung Minyak	-15.75	-21.52	5.27	2.58
	Gula dari berbagai Tanaman (Tebu, Beet)	-0.03	0.11	-0.05	-0.04
	B. Usulan AS	Padi dan Olahannya	-15.55	2.44	0.02
Gandum		-1.49	0.75	-0.25	0.05
Sereal lainya		-0.89	0.43	0.11	0.13
Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan		-0.87	0.34	-0.06	-0.01
Biji-bijian Mengandung Minyak		-10.49	-21.31	3.89	1.93
Gula dari berbagai Tanaman (Tebu, Beet)		-0.02	0.08	-0.04	-0.03
C. Usulan UE		Padi dan Olahannya	-17.59	2.72	0.02
	Gandum	-1.61	0.76	-0.25	0.06
	Sereal lainya	-0.97	0.48	0.13	0.17
	Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan	-0.97	0.34	-0.06	-0.01
	Biji-bijian Mengandung Minyak	-12.40	-19.20	4.28	2.10
	Gula dari berbagai Tanaman (Tebu, Beet)	-0.02	0.09	-0.04	-0.04
	D. KTM Hongkong (Minimal)	Padi dan Olahannya	-17.59	2.72	0.02
Gandum		-1.61	0.76	-0.25	0.06
Sereal lainya		-0.97	0.48	0.13	0.17
Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan		-0.97	0.34	-0.06	-0.01
Biji-bijian Mengandung Minyak		-12.40	-19.20	4.28	2.10
Gula dari berbagai Tanaman (Tebu, Beet)		-0.02	0.09	-0.04	-0.04

Sumber: GTAP Data Base (2004)

dikatakan apabila peningkatan volume produksi beberapa produk pangan ini terjadi karena UE tetap memelihara subsidi domestik dalam bentuk lain, sehingga petani atau perusahaan pertanian pangan tetap dapat berada dalam jalur produksi mereka. Bagi K 33 keadaannya lain lagi, dimana semua usulan memprakirakan produksi Hortikultura dan Gula nya menurun antara 0,01-0,04 persen dengan pemotongan SD. Hasil ini sedikit berbeda dari hasil yang diperoleh Jensen dan Yu (2005) yang mendapatkan bahwa dengan penyesuaian struktural yang terjadi pada pertanian di UE, maka produksi gandum dan biji-bijian akan merosot.

Bagi Indonesia, komoditas yang mengalami penurunan produksi akibat penurunan BD di NM adalah Gandum, Hortikultura, dan Gula dari berbagai tanaman, sedangkan yang mengalami peningkatan produksi adalah Padi, Jagung, Kedelai. Dengan demikian, dampak penurunan BD di NM terhadap produksi pertanian di Indonesia sangat berbeda dari apa yang terjadi di NM. Penurunan produksi ke tiga kelompok komoditas ini tentu tidak terlepas dari perubahan harga-harga produknya di pasar dunia mengingat Indonesia merupakan negara pengimpor bersih atau *net importer*. Meskipun tidak dianalisis secara khusus besar kemungkinan harga-harga ke tiga produk ini diprakirakan menurun. Alasannya sederhana, banyak negara terutama NM memberikan subsidi dalam berbagai bentuk yang sangat besar bagi ke tiga komoditas ini sehingga

menekan harga dunianya dan selanjutnya menekan harga di pasar domestik Indonesia. Produksi Gandum mengalami penurunan paling besar, antara 0,25-0,29 persen dan tanaman ini sangat terbatas volume produksinya serta pengembangannya juga masih mengalami kesulitan. Sedangkan komoditas yang peningkatan produksinya paling menonjol di Indonesia adalah Kedelai, dengan laju sebesar 3,89-5,27 persen, selainnya cenderung di bawah satu persen. Produksi Padi sendiri mengalami peningkatan hanya sebesar 0,02-0,03 persen. Untuk itu Indonesia tertantang untuk di masa depan mampu berperan dalam produksi kedelai. Dapatkah ahli-ahli agronomi Indonesia mengatasi berbagai hambatan iklim dan penyakit kedelai?

3.2.3. Dampak Terhadap Neraca Perdagangan

Penurunan BD di NM diprakirakan akan mempengaruhi keragaan ekonomi makro suatu negara. Hal ini misalnya terlihat pada indikator neraca perdagangan. Dari **Tabel 3.5** terlihat bahwa pemotongan BD di NM menyebabkan neraca perdagangan NM khususnya UE bernilai negatif. Artinya, nilai impor UE jauh lebih besar daripada nilai ekspornya, sementara AS memperoleh neraca perdagangan positif sebesar 140 – 234 juta dolar AS. Maka itu tidaklah mengherankan apabila NM terutama UE berusaha keras pada setiap perundingan untuk tidak menurunkan BDnya, sebaliknya juga mengherankan

Tabel 3.5. Pengaruh Pemotongan Subsidi Domestik terhadap Perubahan Neraca Perdagangan (%)

Negara/Agregasi Negara	Usulan K 20	Usulan AS	Usulan UE	KTM Hongkong (Minimal)
AS	234.5	124.2	173.3	140.5
UE	-210.5	-50.5	-135.8	-70.7
Indonesia	24.3	18.7	20.0	18.3
K 33	202.9	156.0	166.4	151.9

Sumber: GTAP Data Base (dibah).

mengapa AS tidak berniat menurunkan BDnya padahal penurunan ini berpotensi meringkaskan neraca perdagangannya.

Peningkatan neraca perdagangan AS dimungkinkan oleh peningkatan harga-harga produk pertaniannya, meskipun volume produksi menurun, sementara UE mengalami defisit neraca perdagangan karena penurunan harga-harga produk pertaniannya, padahal volume produksinya relatif meningkat. Bagi NB, terutama Indonesia seluruh skenario pemotongan BD di NM memberikan neraca perdagangan positif. Artinya, nilai eksportnya masih jauh lebih besar dibanding nilai impornya. Demikian pula negara berkembang lainnya seperti K 33 juga menghasilkan neraca perdagangan positif (Tabel 3.5). Peningkatan neraca perdagangan ini dimungkinkan oleh peningkatan harga-harga komoditas yang terjadi di pasar dunia yang selanjutnya menekan volume impor Indonesia dan K 33, sehingga devisa tidak terbelanjakan.

3.2.2.1. Dampak Terhadap Impor

Penurunan BD di satu NM tertentu cenderung meningkatkan impor negara itu sendiri, seperti terlihat khususnya bagi AS pada komoditas-komoditas yang memiliki subsidi yang tinggi yaitu Padi, Sereal lainya, Kedelai, dan Produk Minyak Nabati (Tabel 3.6). Semua usulan juga memprakirakan bahwa impor Padi dan Olahannya, Sereal lainya, Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan bagi Indonesia, UE, dan K 33 menurun, tetapi bagi AS meningkat. Selanjutnya, impor Indonesia dan K 33 atas komoditas Biji-bijian Mengandung Minyak semakin menurun, dan laju penurunan terbesar dihasilkan skenario usulan K 20. Sementara itu impor AS dan UE atas Biji-bijian Mengandung Minyak diprakirakan meningkat, dan laju peningkatan terbesar terjadi pada usulan K 20 juga.

Impor Gula oleh Indonesia dan K 33 tidak terjadi perubahan berarti, sementara bagi AS dan UE diprakirakan menurun atas komoditas ini. Untuk Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan, Indonesia tidak terjadi perubahan impor yang berarti, sedangkan AS mengalami peningkatan impor, UE dan K 33 menurun

impornya. Hasil simulasi menunjukkan bahwa yang mengalami penurunan tertinggi bagi Indonesia adalah komoditas kedelai, dengan laju 6,8-9,6 persen. Kembali terlihat bahwa komoditas kedelai sangat peka terhadap penurunan BD di negara maju, seperti AS dan UE. Dengan kata lain, penghapusan BD di NM menyebabkan harga komoditas kedelai

meningkat di negara produsen (NM) dan mengakibatkan penurunan impor yang tajam di negara pengimpor, seperti Indonesia. Penurunan impor untuk komoditas lainnya relatif rendah, di bawah satu persen. Dengan demikian terlihat bahwa dampak penurunan BD di NM mengakibatkan penurunan impor di NB akibat dari naiknya harga-harga komoditas di negara-negara yang memberikan BD, yakni NM.

3.2.4. Dampak Terhadap Permintaan Rumah tangga/RT Indonesia Untuk Produk Pertanian

Dalam pembahasan sebelumnya, seiring dengan peningkatan harga komoditas pertanian di NM, Indonesia serta NB lainnya (K 33) dan meningkatnya harga di pasar internasional, maka impor Indonesia, kecuali bagi kelompok Hortikultura terhadap produk-produk yang dipertimbangkan semuanya menurun. Penurunan impor Indonesia ini disebabkan permintaan rumah tangga/RT masyarakat Indonesia menurun, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3.7.

Pada tabel ini ditunjukkan bahwa permintaan rumah tangga untuk seluruh komoditas pada semua usulan mengalami penurunan. Komoditas yang memiliki penurunan tertinggi adalah Kedelai, dengan laju antara 0,41-0,57 persen; kemudian Sereal lainya dengan laju 0,07-0,10 persen; Padi, Gandum, Sayuran dan Gula menurun dengan laju antara 0,04-0,06 persen. Dengan demikian penurunan BD NM pada komoditas tertentu, seperti Kedelai yang memiliki subsidi yang besar di NM juga akan menurunkan permintaan rumah tangga masyarakat Indonesia. Ini sebenarnya merupakan pertanda positif bagi pengembangan dan perluasan produksi dan pengembangan produk-produk hilir komoditas pertanian lokal.

Tabel 3.6. Pengaruh Pemotongan Subsidi Domestik terhadap Perubahan Impor (%)

Skenario	Kelompok Produk	Impor Produk di Negara/Kelompok Negara			
		AS	UE	Indonesia	K 33
A. Usulan KN-20	Padi dan Olahannya	40.6	-1.7	-1.1	-4.3
	Gandum	-0.5	-0.3	0.0	-1.0
	Sereal lainya	2.1	-0.1	-1.0	-1.9
	Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan	1.5	-0.2	0.1	-0.5
	Biji-bijian Mengandung Minyak	22.6	9.7	-9.6	-5.7
	Gula dari berbagai Tanaman (Tebu, Beet)	-0.3	-0.3	0.0	0.0
	B. Usulan AS	Padi dan Olahannya	25.7	-1.3	-0.7
Gandum		-0.2	-0.3	0.0	-0.7
Sereal lainya		1.9	-0.1	-0.7	-10.5
Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan		1.1	-0.2	0.1	-0.3
Biji-bijian Mengandung Minyak		16.1	9.6	-6.8	-4.1
Gula dari berbagai Tanaman (Tebu, Beet)		-0.2	-0.3	0.0	0.0
C. Usulan UE		Padi dan Olahannya	32.5	-1.4	-0.8
	Gandum	-0.4	-0.3	0.0	-0.8
	Sereal lainya	1.8	-0.1	-0.5	-1.4
	Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan	1.2	-0.2	0.0	-0.4
	Biji-bijian Mengandung Minyak	18.1	8.7	-7.7	-4.6
	Gula dari berbagai Tanaman (Tebu, Beet)	-0.3	-0.3	0.0	0.0
	D. KTM Hongkong (Minima)	Padi dan Olahannya	28.7	-1.2	-0.7
Gandum		-0.2	-0.3	0.0	-0.7
Sereal lainya		1.9	-0.1	-0.7	-1.1
Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan		1.1	-0.2	0.0	-0.3
Biji-bijian Mengandung Minyak		16.1	8.8	-6.8	-4.1
Gula dari berbagai Tanaman (Tebu, Beet)		-0.2	-0.3	0.0	0.0

Sumber: GTAP Data Base (2004).

Tabel 3.7. Pengaruh Pemotongan Subsidi Domestik terhadap Perubahan Permintaan Total RT (%)

Kelompok Komoditas	Perubahan Permintaan Total Rumah tangga Indonesia (%)			
	Usulan K 20	Usulan AS	Usulan UE	KTM Hongkong (Minimal)
Padi dan Olahannya	-0.06	-0.04	-0.05	-0.04
Gandum	-0.07	-0.05	-0.06	-0.05
Sereal lainnnya	-0.10	-0.07	-0.08	-0.07
Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05
Biji-bijian Mengandung Minyak	-0.57	-0.41	-0.46	-0.41
Gula dari berbagai Tanaman (Tebu, Beet)	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04

Sumber: GTAP Data Base (diolah).

Menggantungkan kebutuhan domestik terhadap produk-produk pangan impor yang murah dalam jangka pendek memang sangat menguntungkan pihak konsumen di dalam negeri, tetapi dalam jangka panjang mempunyai implikasi yang mungkin tidak terbayangkan, apalagi kalau disadari bahwa pasar internasional bersifat dinamis dan tidak menentu.

Memang selalu ada silang pendapat dari kalangan yang berpandangan bahwa sebahagian besar masyarakat apalagi kalangan keluarga miskin adalah konsumen produk pangan, sehingga kebijakan pangan murah menjadi dambaan agar perekonomian dapat bertumbuh secara berkesinambungan dan kemiskinan semakin terkikis. Berbagai ahli dari negara-negara donor dan dari lembaga publik internasional selalu mengemukakan pandangan ini dan selanjutnya menyarankan bahwa kebijakan BD di NM memberikan eksternalitas positif bagi NB, karena penduduk mereka dapat memperoleh bahan pangan yang murah. Pandangan sebaliknya, kebijakan pangan

murah menyebabkan sektor pertanian dan pedesaan tidak berkembang, sehingga tidak sesuai mengingat petani dan penduduk miskin di pedesaan juga wajar memperoleh pendapatan yang lebih baik dari kegiatan pertaniannya karena bidang inilah sumber utama pendapatan di pedesaan dan kalau pendapatan mereka lebih baik maka perekonomian pedesaan juga akan berkembang.

Namun persoalannya bagi kita di Indonesia tidak sesederhana itu. Yang perlu diantisipasi sejak saat ini adalah bahwa kelangkaan produk pangan sudah menunggu di depan mata, modal kerja semakin sulit didapatkan, biaya angkutan semakin mahal, sumberdaya alam pertanian semakin langka dan terbatas, teknologi terobosan masih jauh dari jangkauan terutama bagi Indonesia. Lalu pertanyaannya "Siapa yang dapat menyalahkan apabila AS atau UE atau negara mana sajakun di dunia ini mengalihkan hasil produksi pangannya bukan untuk dikonsumsi berupa pangan secara langsung, tetapi diolah menjadi produk-produk bernilai lebih tinggi

Tabel 3.8. Pengaruh Pemotongan Subsidi Domestik terhadap Perubahan PDB dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Berbagai Negara/Kelompok Negara (%)

Perubahan PDB (%)

Negara/Agregasi Negara	Usulan K 20	Usulan AS	Usulan UE	KTM Hongkong (Minimal)
AS	0.009	0.006	0.007	0.006
UE	0.009	0.010	0.009	0.009
Indonesia	-0.003	-0.003	-0.003	-0.003
K 33	-0.019	-0.013	-0.015	-0.013

Perubahan Tingkat Kesejahteraan (Juta dolar AS)

Negara/Agregasi Negara	Usulan K 20	Usulan AS	Usulan UE	KTM Hongkong (Minimal)
AS	1538.23	1091.7	1232.26	1089.05
UE	387.88	475.61	376.02	425.86
Indonesia	-28.38	-18.76	-22.27	-18.91
K 33	-646.12	-466.93	-520.32	-460.99

Sumber: GTAP Data Base (data1).

sebagai bahan bakar nabati pengganti bahan bakar fosil atau produk apa saja yang semakin langka saat ini? Siapa yang salah dalam hal ini?". Ini harus menjadi perhatian penting bagi kita untuk merencanakan pembangunan pertanian ke depan secara sungguh-sungguh. Zaman harga impor murah dan mudah mungkin akan semakin menyusut dari pandangan. Oleh karena itu permintaan RT Indonesia atas produk pertanian, khususnya bahan pangan sebaiknya dipenuhi dari produksi domestik.

3.2.5. Dampak Terhadap Produk Domestik Bruto/PDB

Selain indikator neraca perdagangan, PDB juga merupakan suatu indikator ekonomi makro. Dalam hal ini perubahan terhadap PDB digambarkan sebagai persentase perubahan PDB antara kondisi awal dan kondisi yang dihasilkan skenario. Hasil simulasi menunjukkan bahwa terjadi perbedaan dalam

dampak pemotongan BD di NM terhadap PDB NM dan NB. Dalam hal ini NB mengalami penurunan PDB, tetapi dengan persentase yang kecil sekali (**Tabel 3.8**), sementara NM mengalami peningkatan PDB yang juga relatif kecil. Indonesia sendiri diperkirakan mengalami penurunan sebesar 0,003 persen dan K 33 sebesar antara 0,013-0,019 persen. Tingkat penurunan PDB Indonesia ini relatif sangat kecil. AS diperkirakan mengalami peningkatan antara 0,006-0,009 persen, sementara UE diperkirakan mengalami peningkatan antara 0,009- 0,010 persen. Penurunan PDB di Indonesia dan K 33 dapat terjadi karena harga-harga di ke dua kelompok ini meningkat, sementara produksi tidak seluruhnya meningkat dan impor tidak seluruhnya menurun, meskipun neraca perdagangan meningkat dan permintaan rumah tangga menurun. Sementara itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa, dampak pemotongan BD di NM terhadap sektor

pertanian mereka dan terhadap perekonomian NB yang menjadi kekhawatiran NM tidak perlu ada, karena ternyata pengaruhnya sangat kecil terhadap pendapatan nasional NM dan NB seperti Indonesia dan K 33. Oleh karena itu, mereka (NM) seharusnya memelopori upaya ini untuk menghidupkan kembali Putaran Doha yang buntu saat ini, sejalan dengan desakan NB yang menginginkan pemotongan BD di NM ini.

3.2.6. Dampak Terhadap Kesejahteraan

Dampak pemotongan BD di NM terhadap kesejahteraan negara-negara yang terlibat perdagangan menunjukkan hasil yang seiring dengan indikator PDB, dimana tingkat kesejahteraan di AS dan UE tetap meningkat (lihat Tabel 3.8). Ini terlihat pada seluruh skenario simulasi (usulan K 20, AS dan UE serta KTM Hongkong). Peningkatan kesejahteraan paling besar dirasakan oleh AS, yang mencapai nilai hingga lebih dari 1,000 juta dolar AS, sementara UE hanya menikmati kesejahteraan sebesar antara 370-480 juta dolar AS. Sementara itu di NB, terutama Indonesia dan K 33, pemotongan BD di NM ini justru menyebabkan penurunan kesejahteraan, yaitu sebesar 18-28 juta dolar AS di Indonesia dan 480-650 juta dolar AS di K 33, sedangkan Burfisher (2001) mencatat bahwa pemotongan Putaran Uruguay berkelanjutan (tambahan pemotongan 20 persen) dari *Aggregate Measurement of Support/AMS* akan memberikan dampak yang lebih kecil daripada pembatasan bantuan domestik di semua negara-negara dan komoditas-komoditas. Hal ini berbeda dengan hasil yang diprakirakan oleh Anderson dan Martin (2005) dan Anderson et al. (2006) di mana manfaat potensial liberalisasi perdagangan dalam kerangka Agenda Doha masih sangat besar, dan NB mendapat pangsa manfaat lebih besar apabila usulan KTM Hongkong dilaksanakan. Penurunan kesejahteraan di NB inilah barangkasil yang mendorong berbagai lembaga donor dan lembaga publik internasional selalu merekomendasikan agar dalam setiap fora (bilateral dan multilateral) perundingan liberalisasi pertanian pembukaan akses pasar

di seluruh dunia lebih besar dampaknya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia dibandingkan dengan pemotongan BD atau SE.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa dengan kondisi dan struktur ekonomi NM yang sudah matang di segala sektor, terutama industri dan jasa, perubahan yang terjadi pada sektor pertanian tidak terlalu besar dampaknya terhadap sektor-sektor ini. Berbeda halnya dengan keadaan di NB, di mana sebahagian besar penduduknya sangat tergantung pada sektor pertanian, sebagai sumber lapangan pekerjaan dan kehidupan. Jadi, peningkatan harga dunia dan di dalam negeri NB beberapa komoditas pertanian akan menyebabkan harga komoditas pertanian impor akan meningkat dan permintaan rumah tangga menurun, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan. Namun, akibatnya adalah di NB akan terjadi pengalokasian sumberdaya kembali dengan beralihnya sumberdaya pada komoditas-komoditas yang harganya meningkat. Kemungkinan besar pola perdagangan komoditas juga akan berubah, kecuali ada distorsi-distorsi terselubung. Oleh karena itu meskipun dalam jangka pendek terjadi penurunan kesejahteraan, tetapi karena PDB berubah dan harga-harga meningkat serta pola perdagangan pertanian yang berubah, pada jangka panjang kesejahteraan masyarakat akan dapat meningkat juga. Dan Model *GTAP* yang digunakan ini tidak dapat memprakirakan seperti apa sosok perdagangan yang akan terjadi jika seandainya penghapusan seluruh BD di NM dilaksanakan. Bagi Indonesia, segala kemungkinan yang dapat terjadi ini perlu dipelajari secara hati-hati.

PENUTUP

Perundingan pertanian di OPD hampir tidak mengalami kemajuan sejak dihasilkannya kerangka kerja Paket Juli (*July Package*) pada tahun 2004. Perundingan sektor pertanian tetap berjalan sulit, bahkan sampai saat Konferensi Tingkat Menteri (KTM) VI di Hongkong yang telah berlangsung pada Desember 2005 yang lalu. Semua negara

masih ingin melindungi pertaniannya dengan berbagai cara dengan BD, SE atau menaikkan tarif. Makalah menganalisis (*ex ante*) pengaruh pemotongan atau bahkan penghapusan BD yang dilakukan NM terhadap kinerja komoditas pangan Indonesia melalui teknik simulasi.

Hasil simulasi menunjukkan perbedaan yang jelas dalam perubahan harga-harga masukan antara NM (yang diwakili AS dan UE) dan NB (yang diwakili Indonesia dan K 33) akibat pemotongan subsidi domestik di NM. Hal ini ditunjukkan oleh semua skenario yang dicoba. Sementara harga lahan dan upah tenaga kerja/TK tak terampil menurun di NM, keadaan sebaliknya justru terjadi di NB. Bagi faktor produksi modal, pemotongan BD di NM memberi pengaruh yang jelas berbeda juga antara di AS di satu pihak dan di UE, Indonesia dan K 22 di pihak lain untuk semua usulan.

Semua usulan pemotongan subsidi domestik memprakirakan harga-harga semua produk yang dipertimbangkan meningkat di AS, Indonesia dan K 33. Peningkatan harga pertanian di AS umumnya lebih besar dibandingkan dengan peningkatan harga di UE dan NB. Namun, peningkatan atau penurunan harga-harga keluaran tidak begitu terasa di UE kecuali untuk Biji-bijian Mengandung Minyak. Dari enam kelompok produk yang dipertimbangkan, semua usulan pemotongan subsidi domestik memprakirakan harga Padi dan Olahannya di AS memperoleh peningkatan harga yang paling tinggi, sedangkan di UE, Indonesia dan K 33 semua usulan memprakirakan harga Biji-bijian Mengandung Minyak yang meningkat paling besar.

Bagi Indonesia, komoditas yang mengalami penurunan produksi akibat pemotongan BD di NM adalah Gandum, Hortikultura, dan Gula dari berbagai tanaman, sedangkan yang mengalami peningkatan produksi adalah Padi, Jagung, Kedelai. Dengan demikian, dampak penurunan BD di NM terhadap produksi pertanian di Indonesia sangat berbeda dari apa yang terjadi di NM. Neraca perdagangan Indonesia juga positif akibat pemotongan BD di NM. Semua usulan

juga memprakirakan bahwa impor Padi dan Olahannya, Sereal lainnya, Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan bagi Indonesia, UE, dan K 33 menurun, tetapi bagi AS meningkat. Selanjutnya, impor Indonesia dan K 33 atas komoditas Biji-bijian Mengandung Minyak semakin menurun, dan laju penurunan terbesar dihasilkan skenario usulan K 20. Sementara itu impor AS dan UE atas Biji-bijian Mengandung Minyak diprakirakan meningkat, dan laju peningkatan terbesar terjadi pada usulan K 20 juga.

Impor Gula oleh Indonesia dan K 33 tidak terjadi perubahan berarti, sementara bagi AS dan UE diprakirakan menurun atas komoditas ini. Untuk Sayuran, Buah-buahan dan Kacang-kacangan, Indonesia tidak terjadi perubahan impor yang berarti, sedangkan AS mengalami peningkatan impor, UE dan K 33 menurun impornya. Hasil simulasi menunjukkan bahwa yang mengalami penurunan tertinggi bagi Indonesia adalah komoditas kedelai, dengan laju 6,8-9,6 persen. Kembali terlihat bahwa komoditas kedelai sangat peka terhadap penurunan BD di negara maju, seperti AS dan UE. Dengan kata lain, penghapusan BD di NM menyebabkan harga komoditas kedelai meningkat di negara produsen (NM) dan mengakibatkan penurunan impor yang tajam di negara pengimpor, seperti Indonesia.

Seiring dengan peningkatan harga komoditas pertanian di NM, Indonesia serta NB lainnya (K 33) dan meningkatnya harga di pasar internasional, maka impor Indonesia, kecuali bagi kelompok Hortikultura terhadap produk-produk yang dipertimbangkan semuanya menurun. Permintaan rumah tangga untuk seluruh komoditas pada semua usulan mengalami penurunan. Komoditas yang memiliki penurunan tertinggi adalah Kedelai, diikuti Sereal; Padi, Gandum, Sayuran dan Gula.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa terjadi perbedaan dalam dampak pemotongan BD di NM terhadap PDB NM dan NB. Dalam hal ini NB mengalami penurunan PDB, tetapi dengan persentase yang kecil sekali, sementara NM mengalami peningkatan PDB yang juga relatif kecil. Indonesia sendiri diprakirakan mengalami penurunan sebesar 0,003 persen.

Tingkat penurunan PDB Indonesia ini relatif sangat kecil. Seiring dengan indikator PDB, pemotongan BD di NM memberi dampak pada penurunan kesejahteraan, yaitu sebesar 18-28 juta dolar AS di Indonesia dan 460-650 juta dolar AS di K 33, sementara di AS dan UE tetap meningkat. Peningkatan kesejahteraan paling besar dirasakan oleh AS.

Meskipun pemotongan bantuan domestik di NM berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan dan PDB Indonesia, tetapi beberapa produksi dan harga-harga komoditas pertanian pangan dan harga-harga masukan pertanian dapat meningkat, sehingga pendapatan petani komoditas-komoditas dan pemilik sumberdaya pertanian ini dapat meningkat. Peningkatan pendapatan petani ini selanjutnya berpotensi meningkatkan pendapatan pedesaan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Oleh karena itu, Indonesia, seyogyanya aktif dalam perundingan bilateral dan multilateral untuk mendesak agar bantuan domestik di NM ini dihapus.

DAFTAR PUSTAKA

Action Aid. 2004. *The WTO Agreement on Agriculture: Foodrights. ActionAid.* <http://www.actionaid.org>. Diakses September 2004.

Anderson, K. and E. Valenzuela. 2005. "Do Global Trade Distortions Still Harm Developing Country Farmers?" *CEPR Discussion Paper No. 5337*. London.

Anderson, K. and W. Martin. 2005. "Agricultural Trade Reform and the Doha Development Agenda" *WB Policy Research Working Paper 3607*. Washington.

Anderson, K., W. Martin, D. van der Mensbrugghe. 2006. "Doha Merchandise Trade Reforms: What's at Stake for Developing Countries?" *WB Policy Research Working Paper 3646*. Washington.

Burfisher, M. E. 2001. (Ed.). "Agricultural Policy Reform in the WTO-The Road Ahead." *Agricultural Economic Research/AER 802*. Economic Research Service/USDA, Washington, D.C.

Espeit, R. 2007. "Regional Growth and Policies in the European Union: Does the Common Agricultural Policy Have a Counter-Treatment Effect?" *American Journal of Agricultural Economics* 89(2): 116-134.

Gopinath, M., K. Mullen and A. Gulati. 2004. "Domestic Support to Agriculture in the European Union and the United States: Policy Developments Since 1996". *MTID Discussion Paper No. 75*. International Food Policy Research Institute, Washington.

Hertel, T. W. 1997. *Global Trade Analysis: Modeling and Applications*. Cambridge University Press, Cambridge.

Hertel, T. and R. Keeney. 2006. "What's at Stake: The Relative Importance of Import Barriers, Export Subsidies and Domestic Support" In K. Anderson and W. Martin (Ed.). *Agricultural Trade Reform and the Doha Development Agenda*. Palgrave Macmillan (co-published with the World Bank), New York.

Hoskman, B., F. Ng, M. Olorraaga. 2004. "Agricultural Tariffs versus Subsidies: What's More Important for Developing Countries?" *World Bank Economic Review* 18 (2): 175-2004.

Hutabarat, B., M. H. Sawit, Suoriyati, B. Rahmanto, A. Setyanto, H. J. Purba. 2004. *Penyusunan Bahan Advokasi Delegasi Indonesia dalam Perundingan Multilateral*. Laporan Akhir. Proyek/Bagian Pengkajian Teknologi Pertanian partisipatif (The Participatory Development of Agricultural Technology Project/PAATP). Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Bogor.

Hutabarat, B., S. K. Dermoredjo, H. J. Purba, E. M. Lokollo dan Wahida. 2006. *Analisa Notifikasi dalam Kerangka Modalitas Perjanjian Pertanian WTO*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Bogor.

Jensen, H. G. and W. Yu. 2005. "Reforming Agricultural Domestic Support of the EU in the Doha Round: Measurement, Feasibility, and Consequences," *Institute of Food and Resource Economics, the Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen, Denmark*.

Rae, A. N. and A. Strutt. 2003. "The Current Round of Agricultural Trade Negotiations: Should We Bother About Domestic Support?" *The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy* 4 (2): 98-122.

Sawit, M.H. 2003. *Kegagalan Perundingan Pertanian WTO di Cancun: Peluang atau Ancaman Buat Ekonomi Rakyat*, *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Vol 8.

Valdes, A. and W. Foster. 2003. *Special Safeguards for Developing Country: Agriculture in the WTO Negotiation*. Paper presented at the International Conference on Agricultural Policy Reform and the WTO, Italy, June, 23-26, 2003.

Valenzuela, E., T. Hertel, R. Keeney, J. Palmer. 2007. "Assessing Global Computable General Equilibrium Model Validity Using Agricultural Price Volatility." *American Journal of Agricultural Economics* 89(2): 383-397.

Biodata Penulis:

1. **Budiman Hutabarat**. Ahli Peneliti Utama pada Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian/PSE-KP, Departemen Pertanian, Bogor
2. **Saktyanu K. Dermoredjo**. Staf Peneliti pada Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Departemen Pertanian, Bogor.